

**STRATEGI MENURUNKAN ANGKA PUTUS SEKOLAH
DAN MENINGKATKAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH
DI KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR**

Disusun Oleh :

NAMA : BETHRA ARIESTHA
NPM : 2342021058
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Telah diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Bethra Ariestha
NPM : 2342021058
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Strategi Menurunkan Angka Putus Sekolah dan
(Bahasa Indonesia) Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
Judul Tesis : *Strategies to Reduce School Dropout Rates and*
(Bahasa Inggris) *Improve the Average Years of Schooling in*
Ciseeng Subdistrict, Bogor Regency

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing Tesis



Dr. Hamka, M.A.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : BETHRA ARIESTHA
NPM : 2342021058
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL TESIS : STRATEGI MENURUNKAN ANGKA PUTUS
SEKOLAH DAN MENINGKATKAN RATA-
RATA LAMA SEKOLAH DI KECAMATAN
CISEENG KABUPATEN BOGOR

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Agustus 2025
Pukul : 10.30 s.d.12.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS UJIAN TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Firman Hadi Rivai, M.P.A.

Sekretaris : Dr. Asropi, M.Si.

Anggota : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si.

Pembimbing : Dr. Hamka, M.A.



[Handwritten signatures of the examiners and supervisor over the stamp]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : BETHRA ARIESTHA
NPM : 2342021058
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul “Strategi Menurunkan Angka Putus Sekolah dan Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor” adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penulisan tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Agustus 2025

Pembuat Pernyataan,



Bethra Ariestha

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis berjudul “Strategi Menurunkan Angka Putus Sekolah dan Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor” dapat diselesaikan tepat waktu sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap) pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Manajemen Pembangunan Daerah, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Tesis ini menganalisis persoalan tingginya Angka Putus Sekolah (APS) dan rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, dengan menggunakan kerangka Pengarusutamaan Gender (PuG), teori keadilan sosial Mansour Fakih, dan strategi Arthur F. Lykke. Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif sekaligus memperkaya kajian akademik mengenai pembangunan berkeadilan gender dan sosial.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan dukungan. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, yang telah memberikan kesempatan menempuh studi di program ini.
2. Bapak Dr. Hamka, M.A., selaku dosen pembimbing, atas kesabaran, arahan, dan masukan berharga sejak tahap perencanaan hingga penyusunan akhir tesis.
3. Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, M.P.A., selaku Ketua Sidang Penguji, atas masukan, saran, dan perbaikan yang sangat memperkaya kualitas penelitian ini.
4. Bapak Dr. Asropi, M.Si., selaku Sekretaris Sidang Penguji, atas masukan akademik dan dorongan yang memperkuat penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si., selaku Anggota Sidang Penguji, atas masukan, koreksi, dan pandangan kritis yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan tesis ini.
6. Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM beserta Keluarga Besar BKPSDM, Kepala Dinas

Pendidikan, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, atas dukungan, kesempatan, dan akses yang memungkinkan penelitian ini terlaksana dengan baik.

7. Para narasumber penelitian, meliputi jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, pengawas SD, penilik PNF, kepala sekolah pada locus penelitian beserta guru, wali murid, dan peserta didik, atas kesediaan berbagi pengalaman dan informasi berharga bagi kelengkapan penelitian ini.
8. Keluarga tercinta, khususnya Ayahanda Bapak Sofnir (alm.), Ibunda Hasanah Ramli, Ayah mertua Usman Haryanto, Ibunda mertua Ibu Sulkiyah (almh.), istri tercinta Diani Herningtyas, S.Pd., serta buah hati Sabia Belvina Shanum, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
9. Rekan-rekan satu angkatan tugas belajar Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2023, atas kebersamaan dan dukungan yang menjadi energi positif selama proses studi hingga penyusunan tesis ini.
10. Seluruh sivitas akademika Politeknik STIA LAN Jakarta, baik para dosen, tenaga kependidikan, staf administrasi, pustakawan, maupun petugas penunjang lainnya, atas ilmu, bimbingan, bantuan, dan pelayanan yang sangat berarti selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik, praktik pembangunan daerah, serta kebijakan pendidikan yang berkeadilan gender di Indonesia.

Jakarta, 22 Agustus 2025

Penulis

Bethra Ariestha

ABSTRAK

Strategi Menurunkan Angka Putus Sekolah dan Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Bethra Ariestha, Hamka

bethrastialanjakarta@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Angka Putus Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator penting pembangunan pendidikan. Berdasarkan Peta Kabupaten Bogor 2025 dan BPS Kabupaten Bogor 2024, Kecamatan Ciseeng mencatat APS SD tertinggi di kabupaten (126 anak) serta RLS 7,3 tahun, di bawah rata-rata Kabupaten Bogor 8,3 tahun. Kondisi ini mencerminkan ketidaksetaraan akses pendidikan yang dipengaruhi faktor ekonomi, kultural, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebab utama serta merumuskan strategi untuk menurunkan APS dan meningkatkan RLS melalui perspektif responsif gender.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui telaah dokumen, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, penilik PNF, kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Analisis dilakukan menggunakan kerangka keadilan sosial Mansour Fakih (distribusi, pengakuan, partisipasi) dan model strategi Arthur F. Lykke (ends, ways, means, risk).

Hasil penelitian menunjukkan APS dan RLS dipengaruhi oleh biaya tidak langsung pendidikan, nilai patriarkal (nikah dini, bias gender), serta lemahnya dukungan kelembagaan desa. Strategi yang diusulkan meliputi intervensi struktural (subsidi transportasi, beasiswa afirmatif), kultural (literasi gender, kampanye anti nikah dini), dan kelembagaan (forum gender desa, arus utama gender, layanan psikososial).

Penelitian menyimpulkan bahwa penurunan APS dan peningkatan RLS memerlukan strategi transformatif yang menyelaraskan tujuan, cara, dan sumber daya dengan memperhitungkan risiko implementasi. Rekomendasi ditujukan bagi kebijakan pemerintah daerah serta penelitian akademik lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan partisipatif.

Kata Kunci: Angka Putus Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Strategi Pendidikan, Pengarusutamaan Gender, Ciseeng

ABSTRACT

Strategies to Reduce School Dropout Rates and Improve the Average Years of Schooling in Ciseeng Subdistrict, Bogor Regency

Bethra Ariestha, Hamka

bethrastialanjakarta@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

School Dropout Rate (APS) and Average Years of Schooling (RLS) are key indicators of educational development. Based on Penta Bogor Regency 2025 and BPS Bogor Regency 2024, Ciseeng Subdistrict recorded the highest primary school dropout rate in the regency (126 students) and an RLS of 7.3 years, below the regency average of 8.3 years. This condition reflects unequal access to education influenced by economic, cultural, and institutional factors. This study aims to identify the main causes of these disparities and to formulate strategies to reduce APS and increase RLS through a gender-responsive perspective.

The study employed a qualitative descriptive method, using document analysis, field observations, and in-depth interviews with officials from the Education Office, school supervisors, non-formal education inspectors, principals, teachers, parents, and students. Data were analyzed using Mansour Fakhri's social justice framework (distribution, recognition, participation) and Arthur F. Lykke's strategic model (ends, ways, means, risk).

Findings indicate that APS and RLS are mainly affected by indirect educational costs, patriarchal cultural values (early marriage, gender bias), and weak institutional capacity at the village level. The proposed strategies include structural interventions (transport subsidies, affirmative scholarships), cultural interventions (gender literacy, campaigns against early marriage), and institutional strengthening (village-based gender forums, mainstreaming, and psychosocial support services).

The study concludes that reducing APS and improving RLS requires transformative strategies that integrate objectives, methods, and resources while anticipating implementation risks. Recommendations are addressed to local government policies and future academic research using quantitative and participatory approaches.

Keywords: *School Dropout Rate, Average Years of Schooling, Education Strategy, Gender Mainstreaming, Ciseeng*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL TESIS	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	21
C. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian	22
E. Manfaat Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Penelitian Terdahulu	23
B. Tinjauan Kebijakan	27
C. Tinjauan Teori	40

D. Kerangka Berfikir.....	72
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	75
A. Metode Penelitian	75
B. Teknik Pengumpulan Data	76
C. Pedoman Telaah Dokumen	81
D. Instrumen Penelitian	82
E. Teknik Analisis Data	83
F. Validasi Data	85
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Gambaran Umum Kabupaten Bogor	87
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	93
BAB V. SIMPULAN DAM SARAN	137
A. Simpulan	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	141
LAMPIRAN.....	149

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Angka Putus Sekolah (APS) pada Jenjang Pendidikan Dasar (PAUD, SD, SMP/Sederajat) di Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	14
Tabel 1.2 Data Angka Putus Sekolah (APS) pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	15
Tabel 1.3 Data Angka Putus Sekolah (APS) di Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	16
Tabel 1.4 Kondisi Pendidikan pada Sekolah dengan Angka Putus Sekolah (APS) Tinggi di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	17
Tabel 1.5 Rasio Angka Putus Sekolah (APS) Lima SD dengan APS Tertinggi di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	18
Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Antar Teori Strategi	67
Tabel 3.1 Daftar Informan Kunci	78
Tabel 4.1 Data Administratif Kabupaten Bogor Tahun 2023	87
Tabel 4.2 Data Administratif Kecamatan Ciseeng	89
Tabel 4.3 Analisis Indikator PuG Bappenas di Kecamatan Ciseeng	119
Tabel 4.4 Perbandingan APS & RLS: Ciseeng vs Kabupaten, Provinsi, Nasional Tahun 2024	120
Tabel 4.5 Integrasi Temuan Penelitian dengan Kerangka Kebijakan	131
Tabel 5.1 Ringkasan Strategi Praktis	140
Tabel 5.2 Ringkasan Strategi Akademik	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tren IPM Indonesia Tahun 2020–2024.....	10
Gambar 1.2 IPM Indonesia Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020–2024	11
Gambar 1.3 Perkembangan IPM Jawa Barat Tahun 2020 – 2024.....	11
Gambar 1.4 Data IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2024.....	12
Gambar 1.5 Rekap data pendidikan menurut jenjang (PAUD, SD, SMP/ sederajat) dan status, Kabupaten Bogor Tahun 2024.....	13
Gambar 2.1 Analisis Angka Putus Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berdasarkan Teori Kegagalan Sistemik dalam Mewujudkan Keadilan Akses Pendidikan menurut Mansour Fakih.....	52
Gambar 2.2 Model Strategi Arthur Lykke.....	65
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir Strategi Menurunkan Angka Putus Sekolah dan Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor	73

DAFTAR GRAFIK

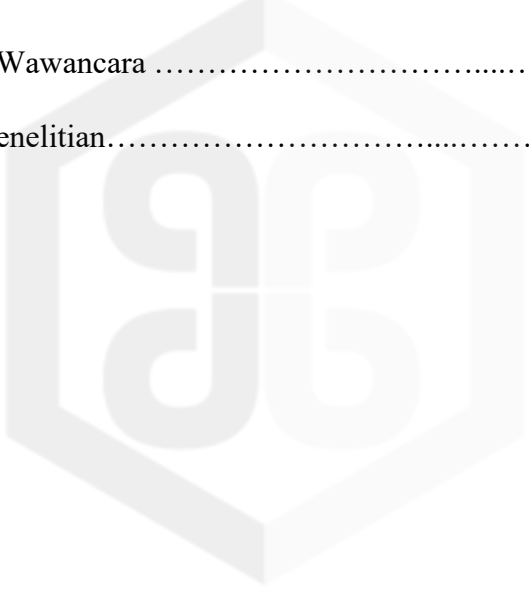
Grafik 4.1 Tren APS SD Kecamatan Ciseeng menurut Jenis Kelamin 117 (2022-2024)



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

1. Administrasi Penelitian.....	149
2. Pedoman Wawancara	155
3. Integrasi Hasil Wawancara	158
4. Dokumentasi Penelitian.....	184



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISTILAH

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)	:	Rencana keuangan tahunan pemerintah desa, termasuk untuk program pendidikan.
APS (Angka Putus Sekolah)	:	Indikator pendidikan yang mengukur jumlah peserta didik yang berhenti sekolah pada jenjang tertentu.
BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	:	Bantuan biaya operasional dari pemerintah untuk menunjang kegiatan pendidikan.
BPS (Badan Pusat Statistik)	:	Lembaga resmi penyedia data statistik, termasuk APS, RLS, dan IPM.
Beasiswa Afirmatif	:	Bantuan pendidikan bagi kelompok rentan, termasuk anak perempuan, miskin, dan yatim piatu.
CSR (Corporate Social Responsibility)	:	Tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat mendukung pendidikan.
Forum Gender Desa (FGD)	:	Lembaga partisipatif desa untuk integrasi isu gender dalam perencanaan pembangunan.
IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	:	Indikator pembangunan yang mengukur peran dan keterwakilan perempuan dalam aspek politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan.
IPG (Indeks Pembangunan Gender)	:	Indikator pembangunan yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan kesetaraan gender.
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	:	Indikator pembangunan mencakup pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.
Layanan Psikososial	:	Pendampingan konseling untuk siswa guna mencegah putus sekolah akibat faktor sosial dan psikologis.
Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)	:	Forum desa untuk menyusun rencana pembangunan tahunan.

<i>Nikah Dini</i>	:	<i>Pernikahan pada usia anak yang memicu putus sekolah.</i>
<i>Penta Kabupaten Bogor</i>	:	<i>Sistem informasi pendidikan Kabupaten Bogor yang memuat data pendidikan jenjang dasar dan menengah di Kabupaten Bogor.</i>
<i>PuG (Pengarusutamaan Gender)</i>	:	<i>Strategi pembangunan untuk menjamin tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan dan program.</i>
<i>RAD-PuG (Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender)</i>	:	<i>Dokumen perencanaan daerah yang mengintegrasikan isu gender ke dalam pembangunan.</i>
<i>RLS (Rata-rata Lama Sekolah)</i>	:	<i>Indikator pendidikan yang menunjukkan rata-rata tahun pendidikan formal yang ditempuh penduduk.</i>
<i>SDGs (Sustainable Development Goals)</i>	:	<i>Agenda pembangunan global berisi 17 tujuan, termasuk pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender.</i>
<i>Strategi Kelembagaan</i>	:	<i>Penguatan kapasitas kelembagaan desa dan sekolah dalam mendukung keberlanjutan pendidikan.</i>
<i>Strategi Kultural</i>	:	<i>Intervensi pada aspek nilai, norma, dan budaya lokal.</i>
<i>Strategi Struktural</i>	:	<i>Intervensi pada aspek ekonomi dan kebijakan (misalnya subsidi transportasi).</i>

BAB I

Permasalahan Penelitian

A. Latar Belakang Masalah

Komunitas internasional telah menyepakati kerangka pembangunan global jangka panjang yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* hasil Konferensi Tingkat Tinggi PBB pada September 2015. Agenda ini memuat 17 tujuan pembangunan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mewujudkan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia menjadi salah satu negara penandatangan, sehingga memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan sasaran global tersebut ke dalam kebijakan pembangunan nasional (UNDP, 2015).

Dari 17 tujuan SDGs, kesetaraan gender (*gender equality*) ditempatkan sebagai tujuan ke-5, menegaskan pentingnya akses, partisipasi, dan pemberdayaan yang setara antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Akses merujuk pada kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lain tanpa hambatan struktural maupun kultural (Moser, 1993; Bappenas, 2013). Partisipasi berarti keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, sedangkan pemberdayaan menekankan pada peningkatan kapasitas serta kontrol perempuan atas hidupnya (Kabeer, 1999; UN Women, 2015). Sejalan dengan itu, Fakih (dalam Nasri, 2016) menegaskan bahwa ketidakadilan gender akan terus bertahan apabila perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan tidak dikritisi secara struktural. Data dan teori tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu normatif global, tetapi juga prasyarat penting dalam sektor pendidikan, yang menjadi salah satu instrumen strategis pembangunan berkelanjutan.

Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender, sejumlah indikator masih memperlihatkan kesenjangan yang serius.

Per Februari 2024, keterwakilan perempuan di DPR hanya 21,9% (UN Women, 2024), sementara partisipasi angkatan kerja perempuan stagnan di kisaran 53% selama lebih dari dua dekade (World Bank, 2021). Skor *Gender Inequality Index* (GII) Indonesia juga masih di bawah rata-rata regional (UNDP, 2023), dan Komnas Perempuan mencatat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2019 (Komnas Perempuan, 2020). Dalam bidang pendidikan, capaian *Indeks Paritas Gender* (IPG) di tingkat sekolah dasar memang mendekati 1,00, namun data BPS (2023) memperlihatkan titik rawan pada keberlanjutan pendidikan. Tingkat Partisipasi Sekolah (TPS) anak usia 7–12 tahun masih tinggi (>98%), tetapi menurun pada usia 13–15 tahun (94,45%) dan jatuh signifikan pada usia 16–18 tahun (63,21%). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Indonesia juga baru 8,84 tahun atau setara kelas IX SMP (BPS, 2023; Susenas, 2022). Data ini menegaskan bahwa Angka Putus Sekolah (APS) dan RLS merupakan indikator krusial yang menunjukkan masih lemahnya keberlanjutan pendidikan, terutama pada kelompok usia remaja. Dalam kerangka kebijakan Pengarusutamaan Gender (PuG), kedua indikator ini telah ditetapkan sebagai ukuran utama untuk menilai sejauh mana akses pendidikan dasar benar-benar responsif gender (Permen PPN/Bappenas No. 15/2020; RPJMN 2020–2024).

Sebelum lahirnya *SDGs*, Pemerintah Indonesia telah menempatkan isu kesetaraan gender dalam agenda prioritas pembangunan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PuG) dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini muncul sebagai respons terhadap kesenjangan yang nyata dalam berbagai dimensi pembangunan, termasuk pendidikan. Data BPS (2000) menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan hanya 5,8 tahun, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki 7,8 tahun. Kondisi ini menegaskan bahwa sejak awal, rendahnya RLS menjadi indikator utama ketertinggalan pendidikan perempuan. Oleh karena itu, kebijakan PuG dirancang bukan sekadar wacana normatif, tetapi instrumen untuk memastikan kesetaraan akses dan keberlanjutan pendidikan melalui

indikator yang terukur, terutama Angka Putus Sekolah (APS) dan RLS, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Permen PPN/Bappenas No. 15 Tahun 2020 dan RPJMN 2020–2024.

Ketimpangan gender dalam pendidikan tidak lahir secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang menempatkan peran perempuan dan laki-laki secara hierarkis. Audiah et al. (2020) menegaskan bahwa struktur sosial yang patriarkal menghasilkan perbedaan akses, kesempatan, dan kewenangan, termasuk dalam memperoleh pendidikan. Siregar (2018) juga menyatakan bahwa gender bersifat dinamis, terbentuk dari interaksi dengan struktur sosial yang bisa direformasi melalui kebijakan. Dalam konteks pendidikan, ketidaksetaraan ini tercermin pada masih tingginya Angka Putus Sekolah (APS) dan rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang mengindikasikan keterputusan akses terhadap pendidikan berkelanjutan. Dengan demikian, intervensi kebijakan melalui PuG menjadi penting untuk mengatasi akar struktural ketidakmerataan tersebut.

Kesetaraan gender diakui sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan di tingkat global (Magar, 2019; Minto, 2020; Rahmawati, 2020, dalam Savitri et al., 2024). Hal ini bukan hanya persoalan pemenuhan hak asasi manusia, melainkan juga prasyarat bagi tercapainya pembangunan inklusif dan berkeadilan. Pendidikan menjadi salah satu sektor paling strategis dalam upaya ini karena berfungsi mentransformasikan norma sosial sekaligus memperbaiki indikator ketimpangan. Huning (2020), Hunting (2020), Nesti (2019), dan Parken (2019) menegaskan bahwa perspektif gender harus diintegrasikan ke dalam seluruh program pembangunan, khususnya pendidikan. Dalam kerangka Indonesia, integrasi ini diwujudkan melalui penetapan APS dan RLS sebagai indikator kunci dalam evaluasi kebijakan PuG (Permen PPN/Bappenas No. 15/2020). Dengan demikian, analisis terhadap ketertinggalan APS dan rendahnya RLS di daerah, termasuk di Kabupaten Bogor dan Kecamatan Ciseeng, memiliki relevansi langsung terhadap agenda global maupun nasional dalam mencapai kesetaraan gender di bidang pendidikan.

Pendidikan tercantum sebagai Tujuan keempat dalam rangkaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dengan fokus pada pencapaian pendidikan berkualitas (*quality education*) bagi seluruh lapisan masyarakat (UNDP, 2015). Dalam kerangka pembangunan, pendidikan tidak hanya berfungsi meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga menjadi fondasi transformasi sosial yang mendorong kesetaraan. Akses pendidikan yang inklusif dan bermutu memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan kritis bagi setiap warga negara. Namun, capaian pendidikan tidak cukup diukur dari akses semata, melainkan juga dari indikator keberlanjutan seperti Angka Putus Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang di Indonesia telah ditetapkan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PuG) (Permen PPN/Bappenas No. 15/2020). Dengan demikian, keterkaitan antara tujuan global SDGs dengan konteks nasional terlihat jelas melalui pentingnya menekan APS dan meningkatkan RLS sebagai upaya membangun pendidikan dasar yang responsif gender.

Dalam kerangka tersebut, Pengarusutamaan Gender (PuG) hadir sebagai strategi kebijakan yang digunakan untuk memastikan pencapaian Angka Putus Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang lebih baik di tingkat daerah. PuG dalam pendidikan diposisikan sebagai strategi normatif yang menjamin kesetaraan akses, partisipasi, dan hasil pendidikan antara perempuan dan laki-laki (Cameron, 2020; Lauve-Moon, 2020; Lomazzi, 2019; Tsige, 2020, dalam Savitri et al., 2024). Dalam kerangka konseptual, PuG diwujudkan melalui prinsip pendidikan inklusif dan responsif gender. Pendidikan inklusif dimaknai sebagai sistem pendidikan yang terbuka bagi seluruh anak tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, status sosial-ekonomi, budaya, atau kondisi fisik (UNESCO, 2017). Sementara itu, pendidikan responsif gender merujuk pada kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan yang memperhatikan kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan secara adil, sehingga keduanya dapat mencapai hasil belajar yang setara (Bappenas, 2013).

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan analitis dalam penelitian ini untuk membaca persoalan ketidakmerataan pendidikan dasar di Kecamatan Ciseeng. Dengan kata lain, konsep pendidikan inklusif dan responsif gender digunakan sebagai kerangka evaluatif terhadap kondisi empiris, khususnya indikator Angka Putus Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Relevansi pendekatan ini terlihat jelas karena APS dan RLS merupakan indikator kunci dalam penilaian kebijakan PuG di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Permen PPN/Bappenas No. 15 Tahun 2020 serta RPJMN 2020–2024. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingginya APS dan rendahnya RLS, sekaligus merumuskan strategi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender di tingkat daerah.

Dalam kerangka normatif, pendidikan inklusif dan responsif gender dimaknai sebagai sistem yang menjamin akses pendidikan setara tanpa diskriminasi, sekaligus memperhatikan kebutuhan berbeda anak laki-laki dan perempuan (UNESCO, 2017; Bappenas, 2013). Prinsip ini diwujudkan melalui dukungan fasilitas, kurikulum yang bebas dari bias gender, peningkatan kapasitas guru, serta kebijakan afirmatif yang adil. Konsep tersebut menjadi rujukan analitis dalam penelitian ini untuk membaca relevansi antara implementasi PuG dengan kondisi pendidikan dasar di daerah. Dengan menggunakan indikator Angka Putus Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagaimana ditetapkan dalam Permen PPN/Bappenas No. 15 Tahun 2020, penelitian ini berfokus pada penggalian faktor penyebab tingginya APS di Kecamatan Ciseeng sekaligus menempatkannya dalam kerangka kebijakan PuG bidang pendidikan

Kendati telah ada regulasi normatif, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PuG) di sektor pendidikan masih menghadapi beragam hambatan. Dari sisi struktural, alokasi anggaran yang responsif gender masih terbatas. Laporan Bappenas (2022) menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% pemerintah daerah yang menyusun *Gender Budget Statement* dalam perencanaan anggarannya, sehingga isu kesetaraan sering luput dalam program pendidikan. Hambatan

kultural tercermin dari kuatnya norma patriarkal yang menempatkan pendidikan anak laki-laki sebagai prioritas, sementara anak perempuan lebih rentan mengalami perkawinan dini atau dibebani kerja domestik. Data BPS (2022) mencatat bahwa angka perkawinan anak di Jawa Barat masih 11,21%, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Adapun hambatan kelembagaan terlihat dari rendahnya literasi gender di kalangan aparatur birokrasi. Kajian Kementerian PPPA (2021) mengungkap bahwa lebih dari 60% aparatur daerah belum memahami konsep PuG secara substansial, sehingga implementasi sering bersifat administratif semata tanpa diikuti perubahan nyata dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan.

Dalam konteks Administrasi Pembangunan Negara, hambatan-hambatan tersebut menegaskan pentingnya peran negara dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh siklus kebijakan publik. Administrasi Pembangunan Negara berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berjalan sesuai prinsip inklusivitas dan keadilan gender. Melalui instrumen seperti *planning-programming-budgeting system* (PPBS) dan penguatan kelembagaan daerah, pemerintah dapat menjamin agar isu Angka Putus Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masuk sebagai prioritas kebijakan pendidikan. Dengan demikian, Administrasi Pembangunan Negara tidak hanya berperan sebagai manajemen birokratis, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk mendorong implementasi PuG, termasuk di Kabupaten Bogor dan Kecamatan Ciseeng, di mana persoalan tingginya APS dan rendahnya RLS masih menjadi masalah mendasar.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penerapan Pengarusutamaan Gender (PuG) di sektor pendidikan terletak pada tiga aspek: pertama, resistensi terhadap perubahan nilai-nilai sosial yang masih patriarkal; kedua, rendahnya literasi gender di kalangan penyelenggara pendidikan; dan ketiga, lemahnya integrasi perspektif gender dalam kebijakan pendidikan (Carroll, 2022; Memon, 2019; Newby, 2021; Rawłuszko, 2019, dalam Savitri

et al., 2024). Dalam kondisi demikian, administrasi pembangunan negara berperan strategis melalui perumusan kebijakan yang responsif gender, pengalokasian anggaran pendidikan yang adil, regulasi afirmatif, serta mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis gender. Dukungan kelembagaan ini menjadi faktor penentu sejauh mana kebijakan PuG dapat diimplementasikan secara konsisten, terutama dalam merespons ketimpangan indikator pendidikan seperti tingginya Angka Putus Sekolah (APS) dan rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Dalam kerangka pembangunan nasional, PuG telah diposisikan sebagai instrumen integral yang harus diterapkan secara sistemik di semua tingkatan pemerintahan (Kusmanto, 2017). Di sektor pendidikan, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen resmi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, maupun hasil pendidikan. Strategi ini dirancang agar pertimbangan gender menjadi bagian dari setiap tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program pendidikan. Dengan demikian, penerapan PuG diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi substantif dalam menurunkan disparitas APS, memperbaiki capaian RLS, serta memperluas keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pendidikan (Harefa et al., 2024).

Menurut Lembaga Ketahanan Nasional, pembangunan nasional dipahami sebagai proses yang menyeluruh, terstruktur, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas manusia Indonesia secara komprehensif, mencakup seluruh lapisan masyarakat (Rifai, 2022). Pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada keseimbangan antara kemajuan eksternal dan kepuasan batiniah, dengan tujuan akhir berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat secara holistik. Dalam kerangka tersebut, pendidikan dipandang sebagai instrumen utama pembangunan manusia karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, indikator pendidikan seperti Angka Putus Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tidak hanya mencerminkan keberlanjutan pendidikan, tetapi

juga menjadi parameter strategis dalam menilai sejauh mana pembangunan nasional bersifat inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip Pengarusutamaan Gender (PuG) yang menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, Pengarusutamaan Gender (PuG) di bidang pendidikan diposisikan sebagai strategi penting untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, serta hasil belajar yang setara. Namun, capaian nasional masih memperlihatkan ketimpangan. Data Kementerian PPN/Bappenas (2021) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia di sektor pendidikan masih menghadapi disparitas antardaerah. Persentase perempuan berusia 25 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan menengah baru mencapai 47,7%, lebih rendah dibanding laki-laki yang mencapai 55,1%. Laporan BPS (2022) juga mencatat bahwa hanya 10,19% perempuan Indonesia yang berhasil menamatkan pendidikan tinggi, sementara laki-laki mencapai 14,29%. Fakta ini menegaskan bahwa integrasi PuG dalam pendidikan belum sepenuhnya optimal, terutama pada jenjang menengah dan tinggi, meskipun regulasi dan kebijakan afirmatif telah tersedia di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam perspektif pembangunan manusia, individu tidak hanya dipandang sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan, tetapi juga sebagai aktor utama sekaligus tujuan akhir dari proses tersebut (Hopkins, 1991). Paradigma ini menekankan bahwa pembangunan harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk hidup lebih panjang, sehat, produktif, dan berdaya. Pendidikan menjadi salah satu instrumen kunci dalam paradigma pembangunan manusia, karena kualitas hidup sangat ditentukan oleh sejauh mana akses pendidikan dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, indikator pendidikan seperti Angka Putus Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan dalam Human Development Index (HDI/IPM) untuk menilai capaian pembangunan manusia. Kesenjangan APS dan RLS, terutama antara laki-laki dan perempuan,

menandakan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PuG) dalam pendidikan masih menghadapi hambatan serius, baik secara struktural maupun kultural.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PuG), Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan PuG dalam pembangunan daerah. Regulasi ini dirancang agar prinsip kesetaraan gender dapat diadaptasi sesuai konteks lokal Kabupaten Bogor, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam konteks pendidikan, tantangan lokal yang menonjol meliputi: (1) ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan semi-perkotaan, yang berdampak pada risiko putus sekolah lebih tinggi pada anak perempuan; (2) tingginya angka perkawinan anak di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bogor (BPS, 2022), yang berimplikasi pada rendahnya keberlanjutan pendidikan; serta (3) dominannya sektor informal sebagai mata pencaharian keluarga, yang memengaruhi prioritas rumah tangga terhadap investasi pendidikan anak. Dengan demikian, penerapan prinsip kesetaraan gender di tingkat lokal diarahkan untuk menjamin bahwa anak laki-laki maupun perempuan memperoleh akses pendidikan yang setara, dukungan beasiswa yang adil, serta perlindungan dari praktik diskriminatif yang menghambat keberlanjutan sekolah.

Komitmen ini diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 yang mengintegrasikan PuG ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) 2020–2024. Integrasi ini menandai konsistensi Kabupaten Bogor dalam menjadikan PuG sebagai instrumen kebijakan pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh, implementasi PuG di tingkat daerah memiliki relevansi langsung dengan pencapaian indikator pembangunan manusia, khususnya sektor pendidikan. Dalam konteks ini, Angka Putus Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ditetapkan sebagai indikator kunci untuk menilai keberhasilan penerapan PuG di bidang pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Permen

PPN/Bappenas Nomor 15 Tahun 2020. Oleh karena itu, kebijakan daerah terkait PuG di Kabupaten Bogor dituntut mampu berkontribusi nyata dalam menekan APS dan meningkatkan RLS sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang berkeadilan gender.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komprehensif untuk mengukur kualitas hidup penduduk suatu wilayah, mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan daya beli (Sapaat et al., 2020). Berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), IPM dibagi menjadi empat kategori: rendah (di bawah 60,00), sedang (60,00–69,99), tinggi (70,00–79,99), dan sangat tinggi (80,00–100,00). IPM berperan penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan manusia secara menyeluruh.

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin dari tahun sebelumnya (74,39 pada 2023). Capaian ini menempatkan Indonesia dalam kategori IPM tinggi, menunjukkan kemajuan pembangunan manusia yang konsisten. Tren pertumbuhan IPM nasional selama 2020–2024 ditampilkan pada Gambar 1.1, yang merefleksikan dinamika pencapaian pembangunan manusia dalam lima tahun terakhir.

Gambar 1.1 Tren IPM Indonesia Tahun 2020–2024



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS No. 85/11/Th.XXVII, 2024

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2024 didorong oleh perbaikan pada dimensi standar hidup layak dan pengetahuan, ditunjukkan oleh kenaikan pengeluaran riil per kapita sebesar 3,71 persen dan pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,46 persen

dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, tidak semua indikator mengalami percepatan; pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) melambat dari 0,31 persen menjadi 0,30 persen, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) turun tipis dari 0,92 persen menjadi 0,91 persen. Dinamika indikator penyusun IPM selama periode 2020–2024 ditampilkan pada Gambar 1.2.

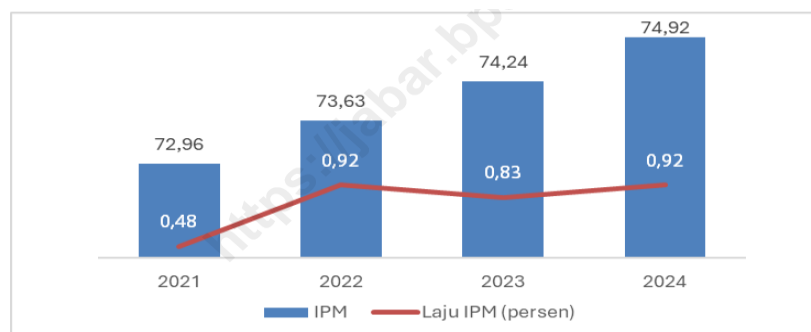
Gambar 1.2 IPM Indonesia Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020–2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	73,37	73,46	73,70	73,93	74,15
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS No. 85/11/Th.XXVII, 2024

Pada level provinsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang konsisten setiap tahun. Pada 2024, IPM Jawa Barat mencapai 74,92 poin, masuk dalam kategori tinggi menurut klasifikasi BPS. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Perkembangan IPM Jawa Barat selama 2020–2024 disajikan secara tahunan dalam Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Perkembangan IPM Jawa Barat Tahun 2020 – 2024.

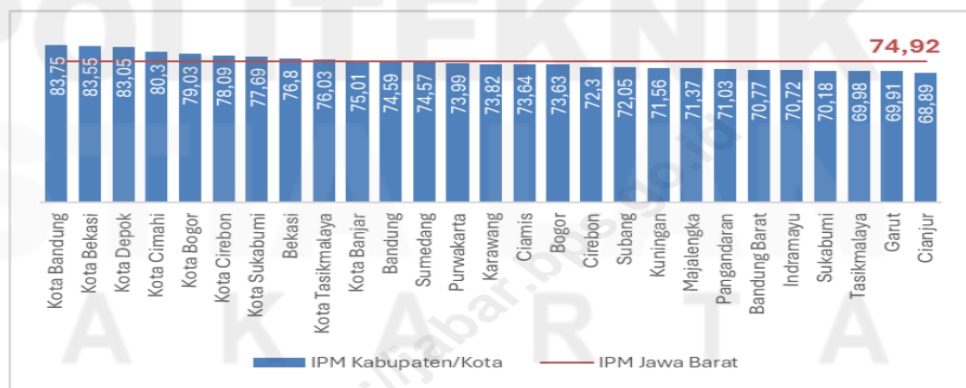


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024.

Berdasarkan data IPM provinsi se-Indonesia tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik, Jawa Barat menempati peringkat ke-10 dari 38 provinsi secara nasional. Pencapaian ini didorong oleh tren peningkatan, khususnya pada dimensi pendidikan. Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 12,68 tahun pada 2023 menjadi 12,80 tahun pada 2024, atau meningkat 0,12 poin. Adapun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercatat sebesar 8,87 tahun, setara dengan jenjang kelas VIII SMP/ sederajat.

Pada tahun 2024, Kabupaten Bogor mencatat nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,63 poin, yang dikategorikan sebagai IPM tinggi. Namun, capaian ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 74,92 poin. Dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor menempati peringkat ke-16, menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia masih menghadapi berbagai tantangan. Rincian capaian IPM Kabupaten Bogor tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Gambar 1.4 Data IPM Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Capaian pendidikan di Kabupaten Bogor tahun 2024 menunjukkan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,75 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,39 tahun, setara dengan tingkat kelas VIII jenjang SMP atau sederajat. Angka tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan, meskipun tantangan dalam pemerataan kualitas dan keberlanjutan partisipasi masih perlu diatasi. Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

berfungsi sebagai indikator strategis dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia dan kinerja pemerintah, melalui empat komponen utama: Angka Harapan Hidup (AHH), HLS, RLS, dan Pengeluaran Riil per Kapita (Sapaat et al., 2020). Rekapitulasi data pendidikan di Kabupaten Bogor berdasarkan jenjang dan status kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 1.5 Rekap data pendidikan menurut jenjang (PAUD, SD, SMP/ sederajat) dan status, Kabupaten Bogor Tahun 2024

Jenjang	Status	Satuan Pendidikan	Peserta Didik	Pendidik	Tendik	Rombongan Belajar	Ruang Kelas
PAUD		2.870	112.075	8.448	3.756	8.719	7.574
	Negeri	1	118	8	5	11	7
	Swasta	2.869	111.957	8.440	3.751	8.708	7.567
SD		1.897	550.118	19.584	4.474	19.019	16.468
	Negeri	1.536	461.130	14.736	3.410	15.266	12.446
	Swasta	361	88.988	4.848	1.064	3.753	4.022
SMP		766	236.161	9.687	2.792	7.244	7.940
	Negeri	107	93.547	3.213	836	2.527	2.491
	Swasta	659	142.614	6.474	1.956	4.717	5.449
PKBM		208	62.819	1.267	362	2.723	1.391
	Negeri	1	564	14	2	16	8
	Swasta	207	62.255	1.253	360	2.707	1.383
		5.741	961.173	38.986	11.384	37.705	33.373
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Periode : 31 Desember 2024							

Sumber: <https://penta.bogorkab.go.id/>, data diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis data diatas, Kabupaten Bogor memiliki 5.741 satuan pendidikan yang tersebar dari jenjang PAUD hingga SMP atau sederajat. Jumlah tersebut terdiri atas 2.870 unit PAUD, 1.897 unit SD, 766 unit SMP, dan 208 unit PKBM sebagai penyelenggara pendidikan non-formal. Dari sisi peserta didik, tercatat total 961.173 orang, dengan rincian 112.075 di PAUD, 550.118 di SD, 236.161 di SMP, dan 62.819 di PKBM. Cakupan ini mencerminkan luasnya layanan pendidikan di Kabupaten Bogor serta urgensi penyusunan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan di tiap jenjang.

Kegiatan pembelajaran di Kabupaten Bogor didukung oleh 38.986 pendidik dan 11.384 tenaga kependidikan, yang berperan strategis dalam menjamin keberlangsungan proses pendidikan yang efektif. Sumber daya manusia ini menjadi elemen kunci dalam peningkatan mutu pendidikan di seluruh jenjang.

Selain itu, *Website Pendidikan Dalam Data Kabupaten Bogor* (<https://penta.bogorkab.go.id/>) menyediakan data Angka Putus Sekolah (APS) yang mencakup jenjang PAUD, SD, dan SMP atau sederajat sampai dengan 31 Desember 2024, disajikan secara terperinci berdasarkan tingkat pendidikan masing-masing, sebagaimana tercantum pada data berikut.

Tabel 1.1 Data Angka Putus Sekolah (APS) pada Jenjang Pendidikan Dasar (PAUD, SD, dan SMP/Sederajat) di Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Jenjang Pendidikan	Peserta Didik Aktif	Peserta Didik Putus Sekolah
PAUD	112075	0
SD	550118	2202
SMP	236161	1858
PKBM	62819	242

Sumber: <https://penta.bogorkab.go.id/>, data diolah (2025)

Pada tahun 2024, Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Bogor masih relatif tinggi, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Tercatat 2.202 peserta didik putus sekolah di jenjang SD, 1.858 di jenjang SMP, dan 242 dari program pendidikan kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Data ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam menjamin keberlanjutan akses pendidikan dasar yang merata.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) tahun 2024, lima kecamatan dengan jumlah peserta didik putus sekolah tertinggi di Kabupaten Bogor adalah Ciseeng (126 peserta didik), Bojong Gede (119), Rumpin (116), Parungpanjang (110), dan Sukaraja (92). Data ini mengindikasikan adanya konsentrasi permasalahan di wilayah tertentu yang memerlukan prioritas penanganan, khususnya dalam perumusan kebijakan penanggulangan Angka Putus Sekolah (APS) yang tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik lokal. Rincian selengkapnya disajikan pada data berikut.

Tabel 1.2 Data Angka Putus Sekolah (APS) pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bogor Tahun 2024.

NO	KECAMATAN	PESERTA DIDIK (AKTIF)	PESERTA DIDIK PUTUS SEKOLAH	PENDIDIK	RASIO ANGKA PUTUS SEKOLAH	RASIO PESERTA DIDIK DENGAN PENDIDIK
1	Ciseeng	13.654	126	381	0,91	36,17
2	Bojong Gede	25.273	119	915	0,47	27,75
3	Rumpin	18.142	116	547	0,64	33,38
4	Parungpanjang	14.647	110	478	0,75	30,87
5	Sukaraja	16.041	92	538	0,57	29,99
6	Tamansari	10.856	91	365	0,83	29,99
7	Cibinong	36.643	91	1.526	0,25	24,07
8	Cijeruk	10.571	86	304	0,81	35,06
9	Babakan Madang	13.875	86	445	0,62	31,37
10	Cileungsi	36.978	82	1.319	0,22	28,10
11	Dramaga	10.113	77	358	0,76	28,46
12	Cigudeg	14.793	76	409	0,51	36,35
13	Citeureup	19.983	76	693	0,38	28,95
14	Ciomas	14.250	74	477	0,52	30,03
15	Tajurhalang	11.039	67	383	0,60	29,00
16	Gunungputri	31.151	60	1.468	0,19	21,26
17	Gunung Sindur	14.786	58	584	0,39	25,42
18	Cibungbulang	12.846	56	461	0,43	27,99
19	Nanggung	9.609	52	304	0,54	31,78
20	Klapanunggal	16.451	50	405	0,30	40,74
21	Kemang	13.327	47	562	0,35	23,80
22	Caringin	9.567	43	332	0,45	28,95
23	Ciawi	11.984	43	425	0,36	28,30
24	Cisarua	13.756	42	405	0,30	34,07
25	Megamendung	11.339	41	354	0,36	32,15
26	Sukamakmur	7.604	35	242	0,46	31,57
27	Sukajaya	6.497	33	232	0,51	28,15
28	Pamijahan	12.758	33	481	0,26	26,59
29	Parung	11.038	32	436	0,29	25,39
30	Leuwiliang	12.003	31	513	0,26	23,46
31	Ciampea	15.123	31	477	0,20	31,77
32	Leuwisadeng	6.418	28	239	0,43	26,97
33	Tenjolaya	4.745	22	178	0,46	26,78
34	Tenjo	8.799	20	310	0,23	28,45
35	Jonggol	14.426	20	526	0,14	27,46

36	Jasinga	12.838	19	463	0,15	27,77
37	Cigombong	10.985	16	397	0,15	27,71
38	Ranca Bungur	6.134	9	220	0,15	27,92
39	Cariu	4.197	8	232	0,19	18,13
40	Tanjung Sari	4.879	4	200	0,08	24,42
Kabupaten Bogor		550.118	2.202	19.584	0,40	28,20

Sumber: <https://penta.bogorkab.go.id/>, data diolah (2025)

Dari sisi rasio APS, Kecamatan Ciseeng menempati posisi tertinggi dengan 0,91, hampir dua kali lipat dari rata-rata kabupaten (0,40). Posisi ini diikuti oleh Tamansari (0,83), Cijeruk (0,81), Dramaga (0,76), dan Parungpanjang (0,75). Perbedaan antara jumlah tercatat dan rasio menunjukkan bahwa kerentanan putus sekolah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kasus, tetapi juga oleh proporsi peserta didik yang terdampak di setiap wilayah. Hal ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang mempertimbangkan kedua indikator tersebut secara bersamaan agar strategi penanganan APS lebih akurat dan berbasis bukti. Rincian sebaran Angka Putus Sekolah (APS) di Kecamatan Ciseeng disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.3 Data Angka Putus Sekolah (APS) di Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor Tahun 2024.

NO	SEKOLAH	PESERTA DIDIK BARU	PESERTA DIDIK LULUS	PESERTA DIDIK PUTUS SEKOLAH
1	SD N CIBEUTEUNG UDIK 02	73	47	29
2	SD NEGERI CIBEUTEUNG MUARA 01	46	50	11
3	SD NEGERI CIBEUTEUNG MUARA 02	66	57	11
4	SD N CIBOGO 01	116	74	8
5	SD NEGERI KARIHKIL 02	57	35	8
6	SD N CIBEUTEUNG MUARA 04	75	63	7
7	SDN PUTATNUTUG 02	81	48	6
8	SD N CISEENG 01	98	59	5
9	SD N KARIHKIL 03	55	46	4
10	SD N CIBENTANG 01	69	39	3
11	SD N KARYA BAKTI	45	48	3
12	SD N PUTATNUTUG 04	71	70	3
13	SD NEGERI BABAKAN 01	51	55	3
14	SD NEGERI CIBOGO 02	38	40	3
15	SD NEGERI KURIPAN 01	81	86	3

16	SD NEGERI PUTATNUTUG 03	68	71	3
17	SD NEGERI BABAKAN 04	50	40	2
18	SD NEGERI CISEENG 02	67	76	2
19	SD NEGERI SINGGASANA	75	64	2
20	SD NEGERI SRI MURNI	57	41	2
21	SDN KARIHKIL 01	60	38	2
22	SDN PARIGI	49	48	2
23	SD N BUKIT CALINGCING	40	38	1
24	SD N KURIPAN 02	84	53	1
25	SD NEGERI PUTAT NUTUG 01	151	73	1
26	SD N BAMBU KUNING	38	28	0
27	SD N CIBENTANG 02	71	52	0
28	SD N KARYA BANGSA	53	44	0
29	SD NEGERI BABAKAN 02	65	40	0
30	SD NEGERI CIBEUTEUNG MUARA 03	57	26	0
31	SD NEGERI CIBEUTEUNG UDIK 01	53	48	0
32	SD NEGERI KAMULYAAN	77	68	0
33	SDN BABAKAN 03	47	58	0
34	SD AL MUKHLISHIN	0	0	0
35	SD INPRES BAITUN NISA	0	0	0
36	SD PELITA ZAMAN	0	0	0
37	SDIT ANDALUSIA	0	0	0
38	SDIT ELYAQIEN	0	0	0
39	SDS IT AN-NUR BABAKAN	0	0	0

Sumber: <https://penta.bogorkab.go.id/>, data diolah (2025)

Detil kondisi di lima SD dengan APS tertinggi di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor tersaji pada data dibawah ini.

Tabel 1.4 Kondisi Pendidikan pada Sekolah dengan Angka Putus Sekolah (APS) Tinggi di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Sekolah	SP Negeri	SP Swasta	PD Aktif	PD Putus	Pendidik	Tendik	Rombel	Ruang Kelas
SD N CIBEUTEUNG UDIK 02	1	0	348	29	6	3	12	6
SD NEGERI CIBEUTEUNG MUARA 01	1	0	377	11	10	4	12	7
SD NEGERI CIBEUTEUNG MUARA 02	1	0	351	11	10	3	10	7
SD N CIBOGO 01	1	0	606	8	17	2	17	11
SD NEGERI KARIHKIL 02	1	0	283	8	9	2	11	8
SD N CIBEUTEUNG MUARA 04	1	0	401	7	11	5	13	7
SDN PUTATNUTUG 02	1	0	330	6	12	2	12	6
	33	6	13,654	126	381	97	439	314

Sumber: <https://penta.bogorkab.go.id/>, data diolah (2025)

SDN Cibeuteung Udik 02 mencatat Angka Putus Sekolah (APS) tertinggi di Kecamatan Ciseeng, dengan 29 peserta didik putus sekolah atau setara dengan rasio 7,69% (7,69 siswa per 100 peserta didik). Tingkat ini menunjukkan kerentanan yang jauh melebihi rata-rata APS di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Perbandingan rasio APS lima sekolah dengan jumlah putus sekolah tertinggi di Ciseeng terhadap rata-rata kecamatan dan kabupaten disajikan pada tabel berikut. Data ini menjadi dasar penting untuk menetapkan prioritas intervensi kebijakan yang terarah, melalui dukungan sosial, ekonomi, dan program pendidikan yang lebih inklusif dan responsif gender.

Tabel 1.5 Rasio Angka Putus Sekolah (APS) Lima SD dengan APS Tertinggi di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor Tahun 2024.

No	Nama	PD Aktif	PD Putus Sekolah	Rasio Angka Putus Sekolah
1	Kabupaten Bogor	550118	2202	0,40
2	Kecamatan Ciseeng	13654	126	0,91
3	SDN Cibeuteung Udik 02	348	29	7,69
4	SDN Cibeuteung Muara 01	377	11	2,84
5	SDN Cibeuteung Muara 02	351	11	3,04
6	SDN Cibogo 01	606	8	1,30
7	SDN Karihkil 02	283	8	2,75

Sumber: <https://penta.bogorkab.go.id/>, data diolah (2025)

Pendidikan dasar di Kabupaten Bogor masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan akses dan mutu layanan. Berdasarkan BPS Jawa Barat (2023), Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bogor tercatat sebesar 92,53, lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Barat sebesar 93,73. Hal ini menandakan capaian pembangunan manusia, khususnya pada aspek pendidikan, masih belum seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Lebih jauh, data BPS Kabupaten Bogor (2023) memperlihatkan pola Angka Partisipasi Sekolah (APSek) menurut kelompok usia yang menggambarkan titik rawan putus sekolah. Pada kelompok usia 7–12 tahun, APSek mencapai 99,77%, hampir semua anak usia SD sudah bersekolah. Namun, pada kelompok

usia 13–15 tahun APSeK turun menjadi 91,46%, dan menurun tajam pada usia 16–18 tahun dengan capaian 55,52%. Data ini menegaskan bahwa transisi dari SD ke SMP merupakan titik kritis yang berpengaruh terhadap kesinambungan pendidikan anak di Kabupaten Bogor.

Kondisi tersebut tercermin jelas di Kecamatan Ciseeng. Berdasarkan BPS Kabupaten Bogor (2024), jumlah peserta didik SD di Ciseeng mencapai 13.678 anak, tersebar di 62 sekolah dasar. Komposisi ini terdiri dari 7.135 laki-laki (52,2%) dan 6.543 perempuan (47,8%), dengan Indeks Paritas Gender (IPG) sebesar 0,917, masih di bawah angka ideal 1,00.

Jika dibandingkan antara jumlah sekolah dengan jumlah murid, maka rata-rata satu sekolah dasar di Ciseeng menampung sekitar 220 murid. Angka ini lebih tinggi dibandingkan standar ideal menurut Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, yang menetapkan bahwa satu sekolah dasar dengan 6 rombongan belajar seharusnya menampung maksimal sekitar 180–200 murid, dengan kapasitas 32 siswa per kelas. Dengan demikian, kondisi di Ciseeng menunjukkan adanya kepadatan relatif tinggi dalam layanan pendidikan dasar. Tekanan jumlah murid per sekolah ini berpotensi memperburuk kualitas layanan, terutama di sekolah-sekolah dengan sarana prasarana terbatas.

Dari sisi keberlanjutan pendidikan, Pendidikan Dalam Data Kabupaten Bogor (2024) mencatat Ciseeng menjadi kecamatan dengan Angka Putus Sekolah (APS) tertinggi di Kabupaten Bogor, yakni 126 anak pada jenjang SD, dengan rasio 0,91, jauh di atas rata-rata kabupaten sebesar 0,40. Beberapa sekolah dengan kasus APS tertinggi adalah SDN Cibeuteung Udik 02 (29 siswa, rasio 7,69%), SDN Cibeuteung Muara 02 (3,04%), SDN Cibeuteung Muara 01 (2,84%), SDN Karihkil 02 (2,75%), dan SDN Cibogo 01 (1,30%).

Dari sisi tenaga pendidik, jumlah guru SD di Ciseeng adalah 570 orang, sehingga rasio guru–murid mencapai 1:24, lebih tinggi dari standar nasional 1:20 (BPS Kabupaten Bogor, 2024). Tekanan kapasitas ini semakin diperburuk oleh keterbatasan sarana-prasarana pendidikan. Profil Pendidikan Kabupaten

Bogor (Penta, 2024) mencatat sekitar 15% ruang kelas SD masih dalam kondisi rusak sedang hingga berat, hanya 68% sekolah yang memiliki sanitasi layak dan terpisah, serta baru 40% sekolah yang memiliki akses TIK memadai.

Selain itu, data Pusdatin Kemendikbud (2024) menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah rombongan belajar (445 rombel) dengan ruang kelas yang tersedia (313 ruang), menghasilkan rasio 1,42, yang berarti satu ruang kelas rata-rata digunakan oleh lebih dari satu rombel. Dari sisi capaian pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Ciseeng baru 7,3 tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten Bogor 8,5 tahun (BPS Kabupaten Bogor, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persoalan pendidikan dasar di Kecamatan Ciseeng merupakan refleksi dari tantangan Kabupaten Bogor secara umum, namun dengan intensitas yang lebih tinggi. IPG yang belum ideal, APS yang tertinggi di tingkat kabupaten, rasio guru–murid yang melebihi standar, kepadatan murid per sekolah yang melampaui standar Permendiknas, keterbatasan ruang kelas, serta rendahnya RLS menjadi indikator kuat bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PuG) di sektor pendidikan dasar Ciseeng masih jauh dari optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menyoroti dua persoalan utama yang paling krusial, yakni tingginya Angka Putus Sekolah (APS) dan rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini, sebagaimana ditegaskan dalam Permen PPN/Bappenas No. 15 Tahun 2020 dan RPJMN 2020–2024, termasuk dalam indikator kunci bidang pendidikan yang digunakan untuk menilai ketidakmerataan akses pendidikan dasar yang responsif gender. Dengan jumlah anak putus sekolah tertinggi di Kabupaten Bogor dan capaian RLS yang hanya 7,3 tahun, kondisi ini memperlihatkan adanya tantangan serius dalam keberlanjutan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan implementasi Pengarusutamaan Gender (PuG) sebagai kerangka analisis utama untuk mengkaji faktor-faktor penyebab ketertinggalan pendidikan serta merumuskan strategi kebijakan yang lebih

inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada dua isu pokok utama:

1. Tingginya Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan dasar.

Kabupaten Bogor menghadapi tantangan serius dalam keberlanjutan pendidikan, dengan 2.202 peserta didik putus sekolah di jenjang SD, 1.858 di SMP, dan 242 dari program PKBM. Dari 40 kecamatan, Ciseeng mencatat jumlah tertinggi pada tingkat SD dengan 126 peserta didik, mengindikasikan ketimpangan spasial dalam capaian pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Bogor.

2. Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor.

Tahun 2024, RLS Kabupaten Bogor tercatat 8,39 tahun, setara dengan kelas VIII SMP atau sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk belum menyelesaikan pendidikan menengah pertama secara penuh, mencerminkan tantangan dalam mencapai pemerataan dan keberlanjutan pembangunan pendidikan.

Kedua persoalan tersebut menegaskan urgensi untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PuG) di bidang pendidikan, khususnya dalam menekan Angka Putus Sekolah (APS) serta memastikan akses dan keberlangsungan pendidikan dasar yang setara.

C. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan tingginya Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang Sekolah Dasar serta rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana strategi mengatasi faktor penyebab tingginya Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang Sekolah Dasar serta rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam kerangka kebijakan Pengarusutamaan Gender (PuG) di bidang pendidikan?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tingginya Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang Sekolah Dasar serta rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
2. Merumuskan rekomendasi strategi yang tepat untuk mengatasi tingginya Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang Sekolah Dasar serta rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam kerangka kebijakan Pengarusutamaan Gender (PuG) di bidang pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua dimensi utama, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini berkontribusi secara teoritis terhadap pengembangan kajian Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam rumpun Manajemen Pembangunan Daerah, dengan fokus pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang Sekolah Dasar (SD) serta rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Lokasi kajian di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, menjadi konteks yang relevan untuk memperkaya diskursus akademik dalam memahami tantangan pembangunan pendidikan yang ada di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi pembuat kebijakan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam menyusun serta mengimplementasikan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PuG) yang lebih efektif di sektor pendidikan. Secara khusus, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong upaya pencapaian kesetaraan gender (*gender equality*) melalui peningkatan akses, partisipasi, dan keberlangsungan pendidikan bagi seluruh masyarakat.

BAB V

Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Tingginya Angka Putus Sekolah (APS) dan rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, merupakan konsekuensi dari kemiskinan struktural, norma patriarkal, lemahnya kelembagaan desa, serta absennya strategi kebijakan yang berkeadilan gender. Secara struktural, meskipun kebijakan penghapusan SPP sudah diterapkan, biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, dan kebutuhan harian tetap menjadi penghalang utama bagi keluarga miskin. Program afirmasi pendidikan pun belum berjalan efektif, sehingga memperlihatkan ketimpangan distribusi hak pendidikan, sebagaimana dikritisi Mansour Fakih dalam kerangka keadilan distributif.

Dari aspek kultural, nilai patriarkal masih dominan, tercermin dalam praktik menikahkan anak perempuan setelah lulus SD atau mengarahkan mereka ke pesantren nonformal (*kobong*). Kondisi ini mereproduksi bias gender dengan menganggap kemampuan membaca, menulis, dan peran domestik sudah cukup bagi anak perempuan, tanpa memberi ruang untuk merancang masa depan pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, secara kelembagaan, perencanaan pendidikan di tingkat desa masih didominasi oleh tokoh laki-laki dan elite keagamaan, sehingga suara perempuan, keluarga miskin, dan ibu rumah tangga kurang terwakili.

Jika ditinjau melalui kerangka strategi Arthur Lykke, permasalahan APS dan RLS mencerminkan ketidakseimbangan antara ends (tujuan peningkatan partisipasi sekolah dan pemutusan rantai kemiskinan), ways (program afirmatif berbasis gender dan lokalitas), dan means (sumber daya APBD, dana desa, serta dukungan kelembagaan). Ketimpangan ini melahirkan risiko kegagalan sistemik berupa normalisasi nikah dini, beban domestik anak perempuan, dan rendahnya keberlanjutan pendidikan hingga SMP. Karena itu, intervensi harus

bersifat transformatif, tidak hanya administratif, melainkan juga membongkar akar ketimpangan sosial. Dalam jangka pendek, target yang realistis adalah menurunkan APS SD minimal 30% dari *baseline* (126 anak menjadi di bawah 90), sedangkan dalam jangka menengah dan panjang fokusnya pada peningkatan RLS dari 7,3 tahun menjadi mendekati rata-rata kabupaten 8,3 tahun. Dengan cara ini, pendidikan dapat diposisikan kembali sebagai instrumen emansipasi dan keadilan sosial yang nyata.

B. Saran

1. Saran Praktis

Untuk jangka pendek (1–2 tahun) perlu intervensi struktural berupa subsidi transportasi dan perlengkapan sekolah melalui APBDes dan BOS afirmatif, misalnya voucher ojek/angkot dan Bank Seragam Desa yang dikelola PKK/Karang Taruna, serta *home visit kolaboratif* guru, perangkat desa, dan tokoh agama. Dalam jangka menengah (3–5 tahun) strategi diarahkan pada aspek kultural melalui sosialisasi anti nikah dini dan literasi gender berbasis tokoh agama, pengembangan madrasah formal integratif, serta penambahan ekstrakurikuler islami seperti hadrah, marawis, dan tadarus. Sementara itu, pada jangka panjang (≥ 5 tahun) perlu penguatan kelembagaan melalui pembentukan Forum Koordinasi Gender Desa, integrasi isu APS/RLS dalam Musrenbangdes, penyaluran beasiswa afirmatif bagi anak miskin dan yatim piatu, serta layanan pendampingan psikososial sekolah bekerja sama dengan Puskesmas.

2. Saran Akademik

Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif (1–2 tahun) penting dilakukan melalui regresi multilevel atau SEM untuk menghasilkan bukti empiris mengenai faktor determinan APS dan RLS sebagai dasar kebijakan berbasis data. Selanjutnya, dalam jangka menengah (3–5 tahun), pendekatan Participatory Action Research (PAR) direkomendasikan dengan melibatkan guru, perangkat desa, tokoh agama, orang tua, dan siswa sebagai *co-researchers* untuk mengembangkan model intervensi partisipatif, seperti beasiswa desa

berbasis gender, kelas motivasi anak perempuan, serta modul literasi gender yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Berdasarkan uraian saran praktis dan akademik di atas, strategi yang diajukan dirangkum secara lebih sistematis dalam tabel. Penyajian tabel ini bertujuan memperjelas keterkaitan antara tujuan (*ends*), langkah yang ditempuh (*ways*), sumber daya pendukung (*means*), serta risiko dan mitigasinya (*risk*), sekaligus menegaskan target capaian pada setiap horizon waktu baik untuk intervensi kebijakan maupun penelitian lanjutan. Rincian saran praktis dapat dilihat pada Tabel 5.1 Saran Praktis, sedangkan saran akademik disajikan dalam Tabel 5.2 Saran Akademik dibawah ini.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Tabel 5.1. Ringkasan Strategi Praktis (*Model Lykke: Ends–Ways–Means–Risk*)

Waktu	Fokus	Ends (Tujuan)	Ways (Strategi)	Means (Sarana)	Risk (Mitigasi)	Target
Jangka Pendek (1–2 th)	Struktural	Menurunkan APS SD	Subsidi transportasi & perlengkapan sekolah (voucher, Bank Seragam Desa); Home visit kolaboratif guru–desa–tokoh agama	BOS afirmatif, APBDes responsif gender, CSR, PKK, tokoh agama	Bantuan disalahgunakan → distribusi barang; Resistensi konservatif → libatkan tokoh agama; Dana terbatas → sinergi BOS–APBDes–CSR	APS turun ≥30% (126 → <90 siswa)
Jangka Menengah (3–5 th)	Kultural	Mengurangi hambatan norma sosial	Sosialisasi anti nikah dini & literasi gender via tokoh agama; Madrasah formal integratif (nasional + kitab kuning); Ekstrakurikuler islami (hadrah, marawis, tadarus)	APBDes, desa ramah anak, Kemenag, pesantren lokal	Norma patriarkal kuat → tokoh agama progresif; Partisipasi rendah → insentif sederhana	RLS naik 0,5 th (7,3 → 7,8 th)
Jangka Panjang (≥5 th)	Kelembagaan	Bangun kelembagaan responsif gender	Forum Gender Desa (FKG); Integrasi APS/RLS di Musrenbangdes & APBDes; Beasiswa afirmatif anak miskin & yatim piatu; Layanan psikososial sekolah–Puskesmas	RAD–PuG, Perbup 88/2020, Dinas Pendidikan, PPPA, OMS	Fragmentasi lembaga → koordinasi RAD–PuG; Politik anggaran → advokasi Perbup; Eksklusi keluarga miskin → kuota partisipasi desa	RLS mendekati 8,3 th (setara kabupaten)

Tabel 5.2. Ringkasan Saran Akademik (*Model Lykke: Ends–Ways–Means–Risk*)

Waktu	Pendekatan	Ends (Tujuan)	Ways (Metode)	Means (Sarana)	Risk (Mitigasi)	Target
1–2 th	Kuantitatif	Bukti empiris faktor APS/RLS	Regresi multilevel / SEM	Data BPS, Susenas, Dapodik, Penta Bogor	Data mikro sulit → MoU BPS/Dinas Pendidikan	Basis data statistik tersedia
3–5 th	PAR	Model intervensi partisipatif	<i>Co-researchers</i> (guru, orang tua, tokoh agama, siswa); <i>Pilot project</i> beasiswa desa, kelas motivasi anak perempuan, modul literasi gender	RAD–PuG, sekolah, komunitas lokal	Partisipasi rendah → insentif; Resistensi budaya → narasi tokoh agama	Model replikasi di desa lain

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, G., & Amri, K. (2021). Do gender empowerment and democracy reduce poverty rate? A cross-provinces evidence from western Indonesia. *Economics & Sociology*, 14(3), 54–71. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2021/14-3/3>
- Ajija. (2011). *Model regresi berganda: Analisis multikolinearitas*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Antasari, Y., & Hadi, S. (2017). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1), 55–66. <https://doi.org/10.22146/jsp.28930>
- Ardianto, Y. (2019). *Memahami metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Audiah, A., Tarma, T., & Mulyati, M. (2020). Pengaruh gender inequality dalam keluarga terhadap perilaku responsif gender pada remaja. *JKKP*, 7(2), 210–219.
- Azmy, A. S., & Pertiwi, F. (2021). Implementasi kebijakan PUG di bidang pendidikan di Kota Bogor. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 19(2), 160–170.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. Jakarta: Kemendikbudristek. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Bapedalitbanda Kabupaten Bogor. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bogor Tahun 2023*.
- Bappenas. (2021). *Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (Stranas PUG)*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2022). *Gender Budget Statement 2022*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: Not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, 11(10), 831–838. <https://doi.org/10.17265/1548-6591/2014.10.003>
- Berkebile, R. E. (1989). Military strategy revisited: A critique of the Lykke formulation. *Military Review*, May.
- BPS. (2024). *IPM menurut provinsi di Indonesia 2017–2023*. Jakarta: BPS.

- BPS. (2024). *IPM menurut kabupaten/kota di Jawa Barat 2017–2023*. Jakarta: BPS.
- Buckel, C. (2021). A new look at operational art: How we view war dictates how we fight it. *Joint Force Quarterly*, 100, 94–101.
- Budio, A. (2019). *Manajemen strategis dalam perspektif organisasi publik dan bisnis*. Yogyakarta: Media Sains Indonesia.
- Cameron, C. (2020). Women's education and empowerment in developing societies. *Development in Practice*, 30(6), 741–754.
- Carroll, S. J. (2022). *Gender and political representation: Global perspectives*. New York: Routledge.
- Chaniago, S. (2014). *Manajemen strategik: Konsep dan aplikasi dalam pembangunan daerah*. Padang: Andalas University Press.
- Darumaya, A., Maarif, M., & Abdurrahman, A. (2023). Strategi pertahanan dalam dinamika geopolitik global: Studi pendekatan Arthur F. Lykke dan Douglas Yarger. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 135–150. <https://doi.org/10.22146/jkn.71892>
- Darumaya, B. A., Maarif, S., Toruan, T., & Swastanto, Y. (2023). Pemikiran potensial ancaman perang siber di Indonesia: Suatu kajian strategi pertahanan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(2), 299–324.
- DP3AP2KB Kabupaten Bogor. (2024). *Buku Profil Gender Kabupaten Bogor Tahun 2023*.
- Durkheim, E. (2001). *The elementary forms of religious life* (ed. revisi; karya asli 1912). Oxford: Oxford University Press.
- Esman, M. J. (1969). *Administration and development in Malaysia: Institution building and reform in a plural society*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fakih, M. (1996). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (1997). *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauziyyah, S. (2022). *Pengaruh IPG, kemiskinan, dan pengeluaran per kapita terhadap IPM di Provinsi Banten* (Disertasi Doktor). UIN SMH Banten.

- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Oxford: Blackwell.
- Ginanjar, S. (1997). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Hadjisarosa, S. (1974). *Ekonomi pembangunan daerah*. Jakarta: UI Press.
- Harefa, N., Pasaribu, V. A., & Rajagukguk, J. (2024). Implementasi PUG bidang pendidikan di SMPN 37 Medan. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(1).
- Hariyanto, H., & Tukidi, T. (2007). Konsep pengembangan wilayah & penataan ruang Indonesia di era otonomi daerah. *Jurnal Geografi*, 4(1), 1–10.
- Hilman, R. R. (2019). *Konstruksi sosial ojek online perempuan: Studi di Kota Surabaya* (Tesis S2). Universitas Airlangga.
- Hopkins, M. (1991). Human development revisited: A new UNDP report. *World Development*, 19(10), 1469–1473.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000. (2000). Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. www.peraturan.go.id
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal. *Gender & Development*, 13(1), 13–24.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Kajian literasi gender aparatur*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2013). *Kaji ulang satu dekade Pengarusutamaan Gender di bidang pendidikan di Indonesia (Ringkasan Eksekutif)*. Jakarta: Bappenas & ACDP.
- Kertati, I. (2021). Analisis IPG dan IDG Kota Surakarta. *Public Service and Governance Journal*, 2(1), 1–11.

- Khoiroh, N. (2015). Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan nasional: Studi kebijakan RPJMN 2015–2019. *Jurnal Perempuan dan Pembangunan*, 3(1), 1–14.
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan kekerasan terhadap perempuan 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). (1979).
- Kuncoro, M. (2016). *Strategi: Bagaimana merumuskan & mengimplementasikan strategi korporat, bisnis, dan fungsional*. Jakarta: Erlangga.
- Kusmanto, T. Y. (2017). Dinamika Pengarusutamaan Gender pada Pendidikan Tinggi Islam. *Sawwa*, 12(3), 303–320.
- Larasati, A. W. (2019). Penanggulangan putus sekolah dengan pelibatan orang tua di Desa Rumpin. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 13(2), 68–78.
- Lauve-Moon, K. (2020). Intersectionality in gender policy. *Gender & Society*, 34(3), 345–370.
- Leal Filho, W., Kovaleva, M., Țîrcă, D.-M., Shiel, C., Pimenta Dinis, M. A., Nicolau, M., Tsani, S., ... & Sharma, M. (2023). Promoting gender equality across the sustainable development goals. *Environment, Development and Sustainability*, 25(12), 14177–14198. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02656-1>
- Lewellen, T. (1995). *Dependency and development: An introduction to the Third World*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Lomazzi, V. (2019). Measuring gender equality in education worldwide. *Social Indicators Research*, 143(2), 765–785.
- Lous, P., Ginter, P. M., & Duncan, W. J. (2011). *Strategic management: Concepts and cases*. New York: McGraw-Hill.
- Lutfi, A. (2006). *Identifikasi pengaruh perubahan fungsi lahan terhadap sosial ekonomi masyarakat di pinggiran kota: Studi kasus Kec. Palu Utara* (Tesis Magister). Universitas Tadulako.
- Lykke, A. F. (1989). Defining military strategy. In J. Collins (Ed.), *Military Strategy: Theory and Application* (pp. 3–8). Washington, DC: NDU Press.
- Marx, K. (1867). *Capital: A critique of political economy* (Vol. 1). Hamburg: Otto Meissner.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cet. ke-12). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice and training*. London: Routledge.
- Martiany, D. (2011). Implementasi PUG sebagai strategi pencapaian kesetaraan gender. *Aspirasi*, 2(2), 121–136.
- Nasri, D. (2016). Ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam novel *Padusi* karya Ka'bat. *Madah*, 7(2), 225–236.
- Nasution, S. (2012). *Sosiologi pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara.
- Nasution, A. P. (2020). Strategi pembangunan daerah dalam meningkatkan mutu SDA & SDM. *EBMA*, 1(2).
- Newby, V. (2021). Feminist foreign policy and the politics of inclusion. *International Affairs*, 97(2), 457–476.
- Nujuliyani, E., Azhari, F., & Kusuma, M. (2023). Peran strategi pembangunan dalam peningkatan daya saing daerah. *Jurnal Strategi dan Kebijakan Pembangunan*, 12(2), 102–112. <https://doi.org/10.21009/jskp.122.08>
- Nujuliyani, S., Azhari, Y., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Sukendro, A. (2023). Strategi Pemerintah NTB mencegah konflik WNA–masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 416–423.
- Nuridin, M. (2024). Social institutions and gender index (SIGI) di Indonesia: Tantangan & peluang. *Jurnal Sosial Politik*, 19(1), 55–72.
- OECD. (2010). *Social Institutions and Gender Index (SIGI) report*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2017. (2017). Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bogor. www.peraturan.go.id
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 88 Tahun 2020. (2020). RAD-PuG Kabupaten Bogor Tahun 2020–2024. www.peraturan.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011. (2011). Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. www.peraturan.go.id
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2008). Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang pendidikan. www.peraturan.go.id
- Rahmawati, R., Subagja, I. K., Hakim, A., Ermanto, C., & Ali, A. (2024). Praktik baik evaluasi PUG Kota Depok. *Mutiara*, 2(6), 443–451.
- Rawłuszko, M. (2019). Gender equality in policy making: The EU and beyond. *European Journal of Politics and Gender*, 2(1), 55–73.
- Rifai, A. (2022). Rekonstruksi makna pembangunan manusia menurut Bappenas. *Jurnal Ilmiah Ultras Brebes*, 5(2).
- Riggs, F. W. (1964). *Administration in developing countries: The theory of prismatic society*. Boston: Houghton Mifflin.
- Ritonga, R. A., & Sutapa, P. (2020). Literasi dan gender di pendidikan anak usia dini. *Jurnal Obsesi*, 5(1), 965–974.
- Rostow, W. W. (1960). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Royanto, R., Idris, A., & Fitriyah, N. (2019). Implementasi pembangunan infrastruktur di Malinau Selatan. *Jurnal Paradigma*, 8(1), 34–43.
- Sapaat, T. M., Lopian, A. L. C. P., & Tumangkeng, S. Y. (2020). Faktor yang memengaruhi IPM Sulawesi Utara (2005–2019). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(3).
- Savitri, F. N., Waty, E. R. K., Nurrizaliah, M., Adillia, A., Ramadhanti, T., & Marwiyanti, H. (2024). Implementasi PUG di Desa Purnajaya. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(3), 10–10.
- Setiawan, I., Cempaka, F. G., & Reksoprodjo, Y. (2024). Pancasila sebagai landasan Gen Z mempertahankan persatuan. *JPK*, 9(1), 54–65.
- Setyowati, E. (2021). Konvensi internasional CEDAW & dukungan Indonesia melalui ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127–136.
- Siregar, A. (2018). *Perbedaan gender dalam perilaku penemuan informasi akademis* (Disertasi). Universitas Airlangga.

- Sunaryo, T., & Edwards, M. (2010). Kepemimpinan perempuan dalam dunia pendidikan. *Jurnal Kamboti*, 2(1), 21–32.
- Sundaro, H., & Sudrajat, A. S. E. (2019). Analisis pengembangan wilayah Kota Semarang berbasis potensi unggulan. *Jurnal Riptek*, 13(1), 29–38.
- Tazkia, A. T. A., & Cadith, J. (2022). Implementasi PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 25–44.
- Teja, M. (2015). Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir. *Aspirasi*, 6(1), 63–76.
- Tigayanti, E., Soeaidy, M. S., & Nurpratiwi, R. (2014). Implementasi kebijakan PUG bidang pendidikan di Kota Malang. *Wacana*, 17(3), 201–208.
- Tikson, D. T. (2005). *Keterbelakangan & ketergantungan: Teori pembangunan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand*. Makassar: Ininnawa.
- Timpal, M. (2021). *Manajemen strategis: Teori dan aplikasi dalam organisasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.
- UNDP. (2023). *Human Development Report 2023/2024: Gender Inequality Index*. New York: UNDP.
- UNESCO. (2002). *Gender equality and equity: A summary review of UNESCO's accomplishments since the Fourth World Conference on Women (Beijing 1995)*. Paris: UNESCO.
- UN Women. (2020). *Women in politics: 2020*. New York: UN Women.
- UN Women. (2024). *Women in politics: 2024*. New York: UN Women.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984. (1984). Ratifikasi CEDAW. www.peraturan.go.id
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999. (1999). Pengesahan Konvensi ILO No. 111. www.peraturan.go.id
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. (1999). Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. (2003). Sistem Pendidikan Nasional. www.peraturan.go.id

Wardana, R. I., & Magriasti, L. (2024). Analisis ekonomi politik & gender: Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. *Multiverse*, 3(1), 40–46. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1381>

Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. New York: Oxford University Press.

Wisnujati, R. (2020). Indeks pembangunan manusia sebagai indikator pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 145–158.

World Bank. (2021). *Women, Business and the Law 2021*. Washington, DC: World Bank.

Yunanda, W. W., Nulhakim, F., & Soraya, N. A. (2022). Strategi menjaga kedaulatan bangsa di era Society 5.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1195–1202.

Yuslin, H. (2021). Pembuktian strategi PUG: Analisis capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 1(3), 162–170*.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A